

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Donaldson & Davis (1991) menyatakan dalam “*Toward a Stewardship Theory of Management*” bahwa teori *stewardship* berakar dari model perilaku manusia, sebagai situasi dimana tujuan-tujuan individu tidak memotivasi manajemen (*steward*), tetapi lebih kepada sasaran hasil atau output utama mereka untuk kepentingan organisasi. Apabila terjadi selisih atau perbedaan pendapat antara *steward* dengan pemilik modal (*principal*), maka *steward* bukan membantahnya tetapi memperbaiki kembali, karena *steward* lebih memandang usaha untuk pencapaian di masa mendatang dengan selarasnya tujuan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan adanya maksimalisasi antara *principal* dan *steward*.

Teori *stewardship* disebut juga teori pengelolaan (penata layanan) dengan asumsi-asumsi dasar (*fundamental assumptions of stewardship theory*). Podrug (2011) menjelaskan *fundamental assumptions of Stewardship Theory* yaitu sebagai berikut:

- a. Manajemen sebagai *stewards* (pelayan atau penerima amanah atau pengelola)

Dalam hal ini teori *stewardship* menjadikan *steward* adalah pemerintah, artinya pemerintah menjadi pelayan masyarakat atau

penerima amanah sebagaimana mestinya yang mengelola amanah dengan mumpuni.

b. Pendekatan *governance* menggunakan *sosiologi* dan *psikologi*

Dengan dasar *sosiologi* dan *psikologi*, teori *stewardship* menggunakan pendekatan *governance*. Hal tersebut disesuaikan untuk para peneliti agar menguji keadaan manajemen sebagai *stewards* yang dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (*principal*) dan organisasi.

c. Model manusia, berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi

Model of human behaviour pada teori *stewardship* ini dasarnya ada pada *steward* yang memiliki tindakan kelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan bersedia melayani (*collectivistic, pro-organizational, trustworthy*).

d. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan *principal*

Para *principal* tidak termotivasi oleh tujuan individu namun lebih kepada tujuan masa depan atau sasaran utama untuk kepentingan organisasi, hal tersebut adalah gambaran situasi teori *stewardship*, sehingga *steward* bertindak sesuai dengan keinginan *principal*.

e. Kepentingan manajer-prinsipal adalah konvergensi

Konvergensi dalam hal ini diartikan memiliki kesamaan dalam tujuan untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* menyatakan legislatif dan *principal* adalah konvergensi.

- f. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan (*facilitate and empower*)

Teori *stewardship* menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan pengendalian internal organisasi menjadi lebih efektif guna memberikan hasil kemandirian pada keuangan yang baik.

- g. Sikap pemilik mempertimbangkan risiko (*risk propensity*)

Teori *stewardship* mempunyai kecenderungan dalam mempertimbangkan risiko agar dapat menghasilkan kinerja baik.

- h. Hubungan prinsipal-manajemen saling percaya

Teori *stewardship* dibangun atas dasar sifat manusia, yaitu saling percaya, bertanggung jawab, jujur, dan lainnya yang sudah menjadi bagian dari hakikat sifat manusia.

2. Akuntabilitas

Menurut Ulum (2004) akuntabilitas adalah bentuk wujud kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Bagaimana masyarakat bisa mengakses wujud dari pertanggungjawaban dari pemangku amanah melalui media publikasi resmi, sehingga akuntabilitas bisa dirasakan. Mahmudi (2007) menunjukkan akuntabilitas dalam lembaga publik terdapat lima bagian diantaranya:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas yang dimaksud merupakan pertanggungjawaban mengenai penegakan hukum dan norma-norma dalam kejujuran.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas yang dimaksud adalah mempertanggungjawabkan dalam hubungan pola kerja manajerial yang harus dikerjakan secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program-program yang akan dijalankan. Subyek yang berperan dalam program harus mempertanggungjawabkan bagaimana berjalan dengan baik dan upaya yang disiapkan agar program berjalan dengan optimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang diambil. Subyek yang berperan dalam lembaga publik ini harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya, seperti tujuan, alasan, manfaat, dan akibat.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas uang yang disetorkan dari masyarakat kepada pemerintah. Seperti halnya sumber uang tersebut dari mana, terdistribusi ke siapa, dan lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, mengambil pertimbangan dari peneliti terdahulu salah satunya mengenai Akuntabilitas Dana Desa yang telah dilakukan pada kantor desa sekecamatan Ngaglik dengan jumlah enam kantor desa dan seluruhnya dijadikan sampel. Bertujuan mendapatkan bukti empiris berupa pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, motivasi kerja, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa, hal ini diungkapkan oleh Wijaya (2018). Penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan penelitian tersebut yaitu teori *stewardship*.

Selanjutnya diambil dari penelitian Masruhin dan Kaukab (2019) dengan topik pengelolaan dana desa. Studi empiris pada perangkat desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Populasinya sebanyak 16 desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, dengan sampel kepala desa, bendahara desa, dan kepala urusan sebanyak 80 sampel.

Penelitian selanjutnya diambil dari Susilowati (2014) dengan variabel Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Motivasi Kerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Studi kasus pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta. Data yang digunakan adalah data primer dengan sampel 70 orang dari 14 Dinas Pemerintah Kota Surakarta yang terdiri dari staf bagian keuangan dan kepala bagian keuangan.

Menurut Widyatama, dkk (2017) mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dengan sejauh mana penerapan faktor kompetensi dan sistem pengendalian internal dan untuk mengetahui kendala-

kendala dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Dengan menggunakan metode random sampling, sebanyak 61 sampling pada desa di Kabupaten Sigi.

Mada, dkk (2017) dalam penelitiannya Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sesuai dengan variabel yang diambil, tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejumlah 120 sampel yang dilakukan di desa sekabupaten Gorontalo.

C. Penurunan Hipotesis

1. Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Dana Desa

Menurut Siwambudi, dkk (2017) komitmen organisasi dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bisa memperkuat atau terjaga dan terpelihara dengan baik. Artinya dapat disimpulkan jika organisasi terpelihara dengan baik, maka komitmen organisasi untuk setiap pegawai atau sumber daya juga baik.

Putri, dkk (2014) menjelaskan tidak terdapat perbedaan signifikan antara variabel komitmen organisasi berdasarkan status karyawan. Sama halnya dengan penelitian Siwambudi, dkk (2017) interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya pada penelitian

Masruhin dan Kaukab (2019) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun dalam penelitian Perdana (2019) komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa

2. Budaya Organisasi dan Akuntabilitas Dana Desa

Maryati (2018) menjelaskan budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan tradisi bersama dimana hal tersebut mengikat anggota organisasi sebagai acuan untuk bekerja dan berinteraksi sesama anggota. Jika budaya positif sudah bisa diterapkan pada aparatur desa maka setiap pegawai bisa berinteraksi dengan kebiasaan yang baik berorientasi pada tujuan. Output dari budaya organisasi adalah bagaimana kebiasaan pegawai akan memengaruhi tujuan organisasi yaitu dana desa yang akuntabel.

Pada penelitian Hamidi (2013) terdapat pengaruh positif budaya organisasi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas publik organisasi pengelola zakat baik secara parsial maupun simultan. Menurut Wijaya (2016) budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Semangat Baru Jaya. Pada penelitian Rahmawati (2017) budaya organisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Namun dalam penelitian Arlianti, dkk (2018) budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Selanjutnya pada penelitian

Wijaya (2018) budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H₂: Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa

3. Motivasi Kerja dan Akuntabilitas Dana Desa

Robbins (2015) menjelaskan motivasi kerja merupakan keinginan agar melakukan ketersediaan dalam melakukan tingkatan upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan dari upaya tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Dorongan dalam individu menjadi acuan untuk tujuan organisasi diiringi dengan kemampuan dalam melaksanakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan Lesmana (2012) motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyuluh pertanian lapangan. Pada penelitian Safwan, dkk (2013) motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Namun dalam penelitian Susilowati (2014) motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2018) motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian Ifriansyah (2019) motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Waroeng SS Yogyakarta.

H₃: Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa

4. Pengawasan Efektif dan Akuntabilitas Dana Desa

Lumaya (2016) menyatakan peran masyarakat sebagai fungsi kontrol atau pengawasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Fungsi kontrol yang dilakukan masyarakat bukan hanya mengawasi namun sekaligus menjadi subyek dalam program dana desa, maka dari itu pengawasan dari masyarakat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam penelitian Coryanata (2012) partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pada penelitian Sudiarta, dkk (2014) partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian Iswahyudia, dkk (2016) pemahaman partisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap *good governance*. Selanjutnya pada penelitian Mada, dkk (2017) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Umaira dan Adnan (2019) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₄: Pengawasan Efektif berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa

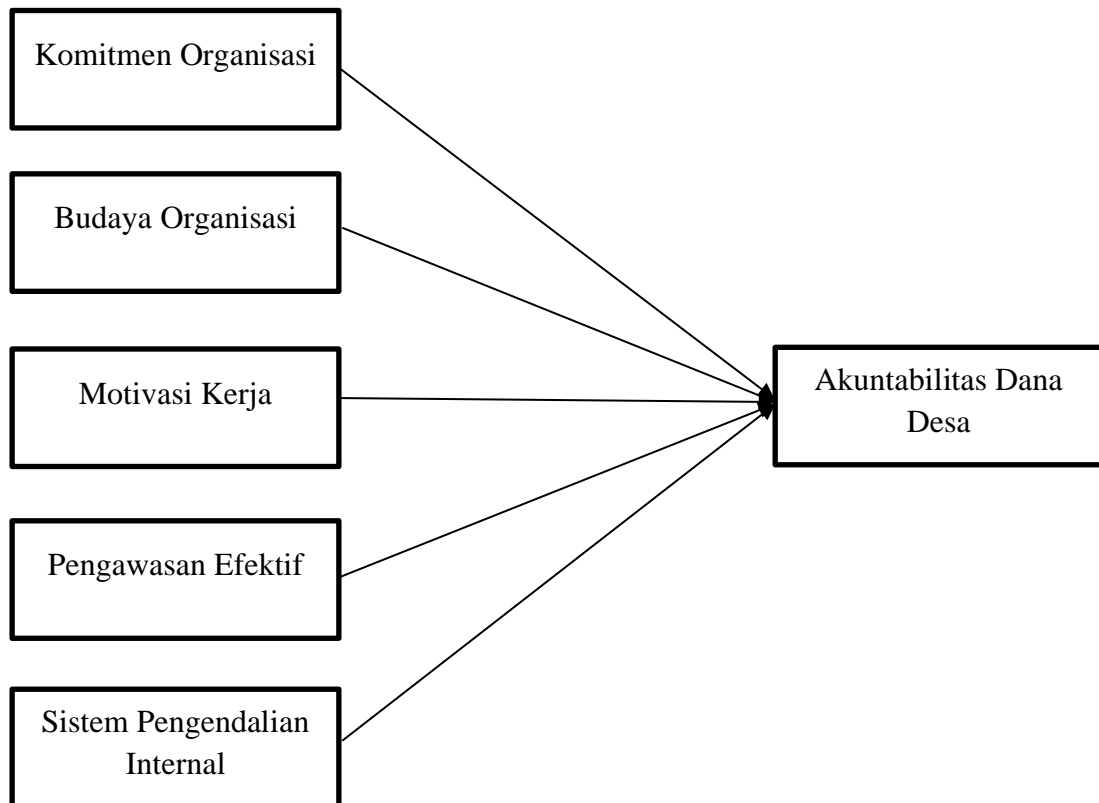
5. Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Dana Desa

Sistem pengendalian internal menurut Aziiz (2019) adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur dari sumber daya pada

suatu organisasi, dan sistem pengendalian internal memiliki peran penting terhadap pencegahan atau mendeteksi fraud sedini mungkin. Artinya jika sistem pengendalian internal pada suatu organisasi berjalan semakin kuat maka tingkat terjadinya penyimpangan terhadap dana desa semakin rendah.

Udyanti, dkk (2014) menyatakan penerapan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima. Selanjutnya dalam penelitian Darmawan (2016) sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Widyatama, dkk (2017) menyatakan variabel sistem pengendalian memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Pada penelitian Sari (2017) sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut Aditya (2018) sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif.

H₅: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

D. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian